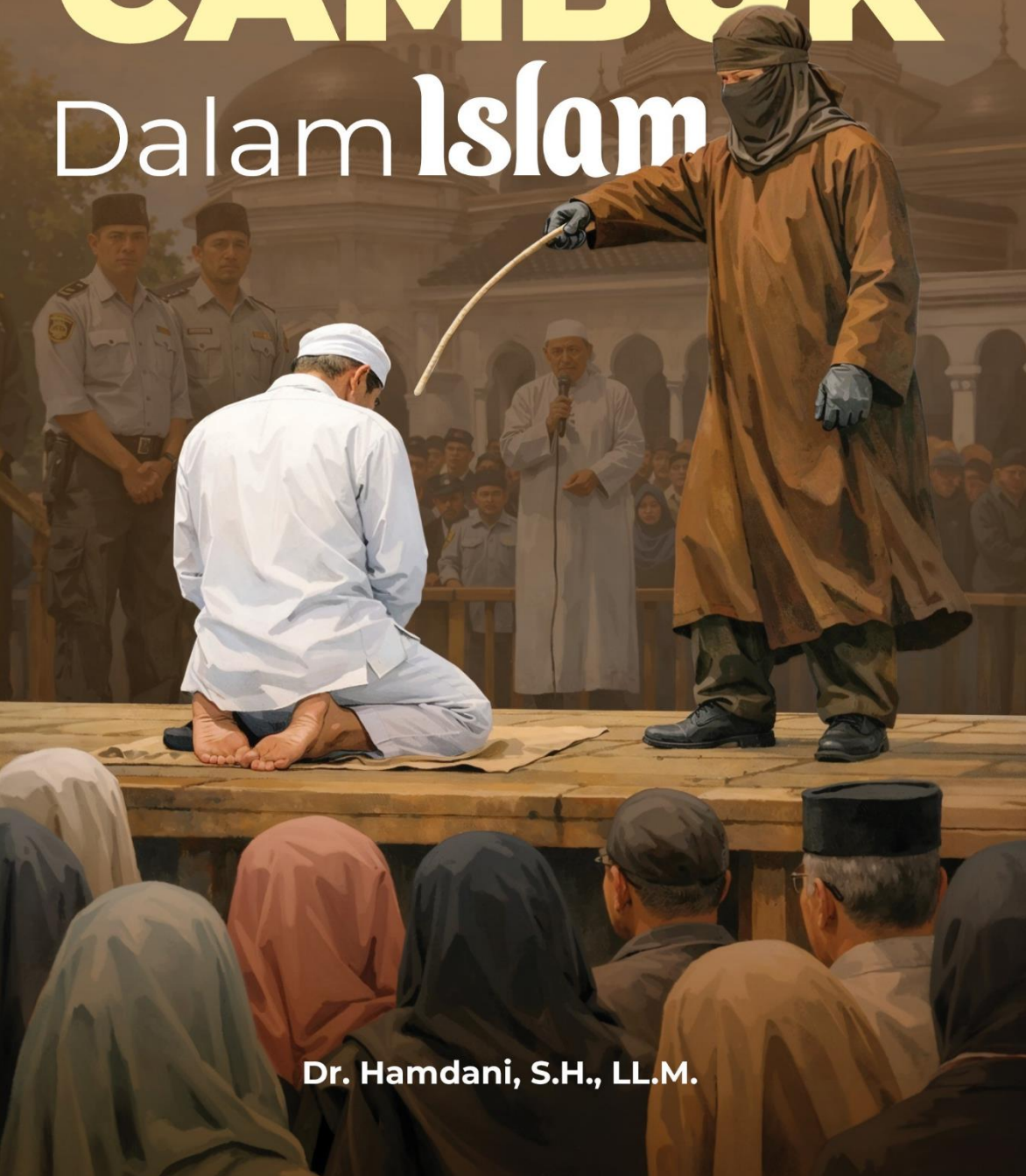


HUKUM CAMBUK

Dalam Islam



Dr. Hamdani, S.H., LL.M.

HUKUM CAMBUK

Dalam Islam

Penulis:

Dr. Hamdani, S.H., LL.M.



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

HUKUM CAMBUK DALAM ISLAM

Copyright @ 2026 Dr. Hamdani, S.H., LL.M.

All right reserved

Penulis

Dr. Hamdani, S.H., LL.M.

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Ika Puji A.

Editor

Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M.

Dr. Yusrizal, S.H., M.H.

Ferdy Saputra, S.H., M.H.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-146-3

Cetakan ke-1, Januari 2026

15,5 x 23 cm, vi+145 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah)

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026027294, 13 Februari 2026

Pencipta

Nama : **DR. Hamdani, S.H., LL.M.**
Alamat : Komplek Permata Hati Gampong, Alue Awe, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, DI Aceh, 24352
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **DR. Hamdani, S.H., LL.M.**
Alamat : Komplek Permata Hati Gampong, Alue Awe, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, DI Aceh, 24352
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **HUKUM CAMBUK DALAM ISLAM**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 13 Februari 2026, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001143979

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

KATA PENGANTAR PENYUSUN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Segala puji syukur kepada Allah ﷻ, yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya, di muka bumi ini, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang mu'amalah, kemudian selawat beserta salam kepada Baginda Nabi Muhammad ﷺ sahabat dan keluarganya, sehingga Buku **Hukum Cambuk Dalam Islam** dapat diselesaikan penulisanya dengan baik. Buku ini merupakan hasil penelitian penulis mengenai Model Pelaksanaan Hukum Cambuk dalam Hukum Pidana Islam. Diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Pidana Islam.

Buku ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa dan akademisi untuk memahami penghukuman dalam hukum pidana Islam, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan baik kalangan akademisi maupun Masyarakat pada umumnya.

Kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan buku ini, sangat diharapkan dari semua pembaca yang Budiman. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua para pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan buku ini.

Wassalam.

Lhokseumawe, Nopember 2025
Penulis,

Dr. Hamdani, S.H., LL.M.

KATA SAMBUTAN DEKAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah ﷻ, yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya, di muka bumi ini, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang mu'amalah, kemudian selawat beserta salam kepada Baginda Nabi Muhammad ﷺ sehingga Buku **Hukum Cambuk Dalam Islam** dapat selesai disusun oleh Bapak Dr. Hamdani, S.H., LL.M. Buku ini merupakan hasil penelitian penulis mengenai Model Pelaksanaan Hukum Cambuk dalam Hukum Pidana Islam.

Buku ini bukan hanya menjadi sumber pengetahuan bagi akademisi, mahasiswa, penegak hukum, dan pemerhati hukum jinayah, namun menjadi rujukan praktis bagi para peneliti yang terlibat langsung dalam perumusan dan pelaksanaan hukum Islam. Selain itu, pembahasan buku ini untuk membangkitkan efektivitas pelaksanaan hukum Pidana Islam yang berkeadilan, kemashlahatan dan perlindungan terhadap martabah umat manusia.

Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas dan memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya khazanah pengetahuan Hukum Islam di Indonesia dan di dunia Islam secara luas.

Saya ucapkan selamat dan terus berkarya sebagai pengemban amanah penyebar ilmu pengetahuan dan mendukung misi perguruan tinggi.

Wassalam.

Blang Pulo, Nopember 2025

Dekan,

Prof. Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENYUSUN	i
KATA SAMBUTAN DEKAN	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 01 PENDAHULUAN	1
BAB 02 FILOSOFI PENGHUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	7
A. Hukuman sebagai Pembalasan.....	11
B. Hukuman sebagai Efek Jera bagi Pelaku Kejahatan	14
C. Hukuman sebagai Efek Jera bagi Masyarakat	15
D. Hukuman Sebagai Perwujudan Keadilan.....	16
E. Hukuman sebagai Penebusan Dosa.....	17
BAB 03 KONSEP KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM ..	21
A. Kejahatan <i>Hudud</i>	24
B. Kejahatan <i>Qisas</i> Dan Pembayaran <i>Diyat</i>	45
C. Kejahatan <i>Ta'zir</i>	56
BAB 04 MODEL HUKUMAN CAMBUK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	65
A. Model Pelaksanaan Hukuman Cambuk Syariah.....	65
B. Model Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh.....	70
C. Model Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Malaysia.....	87
D. Model Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Arab Saudi	93
E. Model Pelaksanaan Hukuman Cambuk Republik Islam Pakistan	105
F. Model Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Republik Islam Iran	112

BAB 05 PENUTUP	125
DAFTAR PUSTAKA	133
PROFIL PENULIS	143
PROFIL EDITOR	145

BAB 01.

PENDAHULUAN

Tulisan dalam buku ini melihat mengenai *Hukum Cambuk Dalam Islam*. Islam sebagai *Rahmatan Lil Alamin* merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan antar sesama manusia, termasuk dalam aspek hukum pidana. Salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam Adalah hukuman cambuk. Bentuk hukuman cambuk merupakan bentuk hukuman yang cukup dikenal dalam hukum pidana Islam. Hukuman cambuk meskipun terdengar keras dan kontroversial bagi sebagian orang, akan tetapi hukuman cambuk dalam Islam memiliki dasar syariat yang kuat serta tujuan yang sangat mulia, yakni menjaga moral dan ketertiban masyarakat.

Dalam tulisan ini juga hanya membahas hukuman cambuk syariah, sebab ada juga negara-negara lain yang melaksanakan hukuman cambuk konvensional. Hukuman cambuk syariah sangat jauh berbeda dengan hukuman cambuk konvensional atau hukuman cambuk dalam hukum pidana sivil, seperti yang dilaksanakan di Singapura dan Malaysia. Malaysia selain melaksanakan hukuman cambuk syariah juga ada melaksanakan hukuman cambuk sivil atau hukuman cambuk konvensional.

Dalam tulisan buku ini juga akan menjelaskan secara singkat mengenai filosofi penghukuman dan konsep kejahatan dalam Islam. Maka dalam buku ini juga akan dibahas filosofi hukuman dalam Islam, konsep kejahatan dalam Islam, yang meliputi; hudud, qisas, dan ta'zir. Meskipun dalam penerapan hukum pidana

Syariah di Aceh, hanya kejahatan ta'zir dan hudud yang telah diberlakukan sementara dalam kejahatan qisas dan pembayaran diyat belum ada qanun.

Dalam penerapan hukuman cambuk Syariah di negara-negara yang melaksanakan hukum pidana Islam seperti Arab Saudi, negara tersebut masih mempertahankan hukum yang berlaku, yaitu hukum Syariah yang berlandaskan mazhab Sunni berdasarkan mazhab Hambali, Syafii, Maliki, dan Hanafi. Sementara itu, negara-negara Islam lainnya seperti Aceh (Indonesia), Malaysia, Pakistan, dan Iran telah melakukan reformasi dalam sistem hukum mereka. Beberapa reformasi tersebut masih bersifat sebahagian kecil dan ada juga yang telah menyeluruh. Hal ini disebabkan karena hukum di negara-negara tersebut telah dipengaruhi oleh hukum kolonial akibat penjajahan.

Hukuman cambuk dilaksanakan di Aceh setelah diberlakukan undang-undang kekhususan oleh pemerintah pusat yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk melaksanakan syariat Islam. Salah satu bentuk kekhususan tersebut dapat dilihat dengan adanya pelaksanaan Syari'at Islam yang dimana masyarakat wajib mentaati peraturan yang bersendikan nilai-nilai Islam ini. Salah satu peraturan yang diatur di Aceh adalah mengenai tindak pidana Islam atau yang lebih kenal dengan Qanun Jinayah yaitu Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat. Dalam qanun tersebut salah satu hukuman yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran qanun adalah hukuman cambuk. Hukuman cambuk merupakan jenis hukuman badan yang dikenakan atas terdakwa dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa sedangkan eksekutornya adalah wilayahul hisbah. Eksekusi pencambukan dilakukan setelah putusan pengadilan/mahkamah syari'ah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hukuman cambuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 7 tahun

2013 tentang hukum acara jinayah/ hukum formil dan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

Sedangkan di Malaysia hukuman cambuk syariah diberlakukan berdasarkan ketentuan dalam konstitusi (Perlembagaan Persekutuan Jadual ke-9 Senarai Negeri dan Akta Parlimen, Akta Mahkamah Syariah (Bidangkuasa Jinayah) (Pindaan 1984). Dalam konstitusi tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Syariah di Malaysia hanya boleh memutuskan hukuman terhadap pelaku pelanggaran Jinayah Syariah dengan denda maksimal RM 5000, penjara tiga tahun dan enam kali cambukan.¹ Kemudian di Malaysia tindak pidana yang dikenakan hukuman cambuk syariah berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain. Berkaitan dengan hukuman cambuk diatur di bawah Pasal 125 dan 126 Akta Prosedur Jinayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 560), Tentang Kaedah dan Prosedur Pelaksanaan Hukuman Cambuk Syariah Wilayah Persekutuan.² Hukuman cambuk terhadap pelaku pelanggaran ketentuan dalam undang-undang syariah telah dilaksanakan setelah diputuskan oleh mahkamah syariah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kewenangan pelaksanaan hukuman cambuk di Malaysia adalah dibawah tanggung jawab ketua penjara. Di Malaysia ada yang namanya hukuman cambuk syariah dan hukuman cambuk dalam pidana umum, maka dalam tulisan ini hanya membahas mengenai hukuman cambuk syariah saja. Penelitian ini akan melihat apakah model pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh dan Malaysia sudah sesuai dengan model pelaksanaan hukuman cambuk secara syariah dan kearifan lokal serta budaya masyarakat di kedua tempat tersebut.

Dalam penerapan hukuman cambuk syariat di Provinsi Aceh, jika kita melihat kepada model hukuman cambuk syariah di

¹ Hamid Jusoh, *Perkembangan Undang-Undang Jenayah di Malaysia*, Dalam Nasimah Hussin, et al., *Undang-Undang Islam Jenayah, Keterangan dan Prosedur*, Dawama Sdn. Bhd, Selangor, Malaysia, 2007, hlm 47-48.

² Nasimah Hussin, et al., *Undang-Undang Islam Jenayah, Keterangan dan Prosedur*, 2007, hlm 47., Lihat juga Abdul Monir Yaacob dan Sarina Othman, *Tinjauan Kepada Perundangan Islam*, hlm 88- 90.

negara lain seperti Arab Saudi, di mana negara tersebut masih mempertahankan hukum Islam yang asli, yaitu hukum syariat yang berlandaskan pada mazhab Sunni yang berdasarkan mazhab Hambali, Syafii, Maliki, dan Hanafi. Sementara itu, negara-negara Islam lainnya seperti Aceh (Indonesia), Malaysia, Pakistan, dan Iran telah melakukan pembaharuan sistem hukumnya. Pembaharuan tersebut ada yang masih sebahagian kecil dan ada pula yang sudah menyeluruh. Hal ini dikarenakan hukum di negara-negara tersebut telah dipengaruhi oleh hukum kolonial akibat penjajahan yang terjadi di negara-negara tersebut.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh didasarkan pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acaar Jinayat. Sementara itu, di Malaysia, hukuman cambuk Syariah diterapkan berdasarkan Konstitusi Federal, Lampiran 9, Daftar Negara Bagian. Kemudian, Undang-Undang Parlemen, Undang-Undang Mahkamah Syariah (Yurisdiksi Pidana) (Amandemen 1984), yang memberi wewenang kepada Mahkamah Syariah untuk menghukum dengan hukuman penjara tidak lebih dari tiga tahun atau denda tidak lebih dari RM5000 atau hukuman cambuk tidak lebih dari enam kali cambukan atau kombinasi dari ketiganya. Kemudian, hukuman cambuk diterapkan berdasarkan Pasal 125 dan 126 Undang-Undang Acara Pidana Syariah (Wilayah Federal) 1997 (Undang-Undang 560), serta Undang-Undang Acara Pidana Syariah di negara bagian yang mengatur metode dan prosedur pelaksanaan hukuman cambuk.

Sementara itu, model tata cara pelaksanaan hukuman cambuk di Arab Saudi masih berpedoman pada kitab-kitab madzhab Sunni, khususnya Madzhab Hanbali. Apabila tidak ada penjelasan dari Madzhab Hanbali, maka akan mengacu pada tiga madzhab lainnya, yaitu Madzhab Syafii, Maliki, dan Hanafi. Selain itu, juga akan mengacu pada ijma dan qiyas para ulama dan hakim atau qadi. Para hakim atau qadi bebas berijtihad dalam menangani perkara di pengadilan.

Model hukuman cambuk di Pakistan diterapkan setelah diberlakukannya Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Cambuk 1979.

Demikian pula di Republik Islam Iran, hukuman cambuk dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Islam Iran, yang menyebutkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam yang mengatur jenis-jenis pelanggaran dan hukuman serta langkah-langkah keselamatan dan rehabilitasi yang seharusnya digunakan bagi para pelanggar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Islam Iran yang menyatakan bahwa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam mengatur jenis-jenis pelanggaran dan hukuman serta tindakan keselamatan dan rehabilitasi yang seharusnya digunakan bagi para pelanggar.³

Dari segi konstitusi, Arab Saudi, Pakistan dan Iran adalah negara-negara yang sepenuhnya menerapkan hukum syariah. Sementara Malaysia menurut konstitusi, Islam adalah agama resmi negara (Kerajaan). Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sepenuhnya menerapkan hukum syariah (hudud, qisas, ta'zir) berdasarkan hukum Syariat Islam (Undang-Undang Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002), berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi tidak secara langsung berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam di Aceh, dari segi perundang-undangan, posisinya sangat lemah jika dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya di mana penerapan hukum Islam didasarkan pada konstitusi.

³ Article 1 – *The Islamic Penal Code deals with the types of offences and punishments and the security and correctional measures that shall be applied to the offender.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. 2010. *Tafsir Pimpinan al-Rahman: Kepada Pengertian Al-Qur'an (30 Juz)*. Kuala Lumpur: Darul Fikir.
- Al-Qur'an. 2009. *Al-Quran Mushaf Malaysia dan Terjemahan*. Shah Alam: Yayasan Restu.
- Al-Qur'an. 2000. *Tafsir Qur'an. Terj.* Muhammad Said. Kuala Lumpur: Victory Agencie, Kuala Lumpur.
- A. Watson. 1999. *Legal Transplants*. Dlm. Peter de Cruz. 1999. *Comparative Law in a Changing Word*. London: Cavendish Publishing Limited.
- Abd al-Qadir 'Audah. 1994. *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, c. 13. Jilid 1. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Abdul Monir Yaacob dan Sarina Othman. 2000. *Tinjauan Kepada Perundangan Islam*. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam (IKIM).
- Abdul Ghani Azmi Bin Idris. 1997. *Mengenal Qanun Jenayah Islam*. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publisher.
- Abdul Halim El-Muhammady. 2005. *Undang-Undang Islam di Beberapa Negara Islam Selepas Merdeka: Asas dan Kerangka Perundangan Negara Islam_Malaysia*, Dlm. Siti Shamsiah Md Supi (pnyt.). Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).
- Abdul Halim El-Muhammady. *Undang-undang Islam: Perbandingan dan Penelitian di Beberapa Negara Islam Selepas Merdeka*. Artikel: Minda Madani. 13 November 2013.

- Abdul Mujieb M. et.al. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdullah Ahmed An-Naim. 2006. *Toward an Islamic Reformation* (Menuju Reformasi Perundangan Islam). Terj. Al-Mustaqeem Mahmud Radhi et.al. Kuala Lumpur: Middle Eastern Graduates Centre Sdn. Bhd. Kerjasama dengan Konrad Adenaur Foundation.
- Abu Mazaya Al-Hafiz et. al. 2004. *Fiqih Jenayah Islam*. Kuala Lumpur: Al-Hidayah.
- Achmad Ali. 1988. *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim. Ujung Pandang Makasar*: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin.
- Imam Abu Hussein Muslim bin Hajjal. 1999. *Shahih Muslim Juz III*, Bab: 9, Jumlah Cambukan Hukuman Ta'zir. Terj. Adib Bisri Musthofa et. al. Kuala Lumpur: Victory Agence.
- Agus Widjaya (pytg.). tt. *Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Dasar 1945, Nota Kesepahaman Pemerintah RI dan GAM*. Banda Aceh: Demos.
- Ahmad 'Azam Mohd Shariff. 2007. Penguatkuasaan Nilai Moral Melalui Undang-Undang di Malaysia: Analisis Ke Atas Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 Dan Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997. *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat (Malaysian Journal of Law and Society)*. ISSN 1394-7729. Volume: 11. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Ahmad 'Azam Mohd. Shariff dan Mazupi Abdul Rahman. 2005. *Siasatan Kes Jenayah Syariah di bawah Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997*. *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat (Malaysian Journal of Law and Society)*. ISSN 1394-7729. Volume: 9. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Ahmad Fathi Bahnasy. 1969. *Al-Siyasah al-Jina'iyah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Kaherah: Maktab Ammar.
- Ainul Bashirah Bt Ismail et.al. 2012. *Kesalahan Khalwat dan Perbuatan Tidak Sopan dan Hukumannya Menurut Islam*,

- Jurnal Hadhari. Volume: 4 Nomor: 2. Institut Islam Hadhari. Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi Malaysia: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
- Akhmad Affandi et.al. Terj. 2008. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath – *Thabari, Tafsir Ath – Thabari*. Besusu Hidayat Amin et.al. (editor). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim. 2006. *Hukum Pidana Islam di Propinsi NAD*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Al Yasa' Abubakar et. al. 2006. *Perbuatan pidana dan hukumnya dalam Qanun Provinsi NAD*. Banda Aceh: Dinas Syari'at.
- Al-Mawardy, Abu Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Basry al-Baghdadiy. 1985. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Anwarullah. 1997. *Criminal Law of Islam*. Kuala Lumpur: A.S.Noordeen.
- Armando, Nina M. 2005. *Ensiklopedi Islam 4: Jinayat-Maut*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Armia Ibrahim. 2004. *Sinkronisasi Hukum Materil dan Hukum Acara yang Diberlakukan pada Mahkamah Syarieyah*, Makalah yang disampaikan oleh Komisi Hukum Nasional "Membangun Peradilan Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam".
- Asraf Md. Hashim. 2000. *Kaedah Pelaksanaan Hukuman Sebat Di Dalam Islam*. Jurnal Syariah (Shariah Journal). Universiti Malaya: Bahagian Pengajian Syariah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Jilid 8 (2). Julai.
- Bustami Abubakar. 2006. *Hukuman sebat Persepsi masyarakat dan Perubahan Sosial*. Tesis. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniri.
- Dammer, Harry R.; Albanese, Jay S. 2010. *Comparative Criminal Justice Systems*. ISBN 978-0-495-80989-0. http://en.wikipedia.org/wiki/legal_system_of_Saudi_Arabia#cite_ref_Dammer_59-0.
- Elizabeth Peiffer. 2005. *The Death Penalty in Traditional Islamic Law and as Interpreted in Saudi Arabia and Nigeria*, William & Mary Journal of Women and the Law. <http://>

//scholarship.law.wm.edu/wmjowl/Vol.11/ iss3/ Article
9.

- Eva Patricia Rakel. 2008. *The Iranian Political Elite, State and Society Relations, and Foreign Relations since the Islamic Revolution*. Netherlands: Universiteit van Amsterdam.
- Esther van Eijk. 2010. *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. O, Jan Michiel (pnyt.). Netherlands: Leiden University Press.
- Farideh Farhi. 2003. *Islam and Political Legitimacy*, Shahram Akbarzadeh et. al. (pnýt.). London & New York: Routledge Curzon.
- Hamdani Zainal Abidin dan Jasri Jamal. 2011. *Perbandingan Sebatan Syariah di Provinsi Aceh dan Malaysia*. Pekanbaru: Jurnal Hukum Respublica. ISSN 1412-2871. Volume: 11. November.
- Hamdani, Dkk, 2023, *Models of Caning in Aceh and Malaysia: A Comparison*, Jurnal: Diponegoro Law Review (DILREV, e-ISSN : 2527-4031) published by Faculty of Law, Universitas Diponegoro -
<https://doi.org/10.14710/dilrev.8.2.2023.190-208>, Indonesia.
- Hamid Jusoh. 2007. *Perkembangan Undang-Undang Jenayah di Malaysia*. Dlm. Nasimah Hussin, et al. Undang-Undang Islam Jenayah, Keterangan dan Prosedur. Selangor Malaysia: Dawama Sdn. Bhd.
- Hasan bin Abduh 'Asiri. 2012. *Kayfiyah Tanfidz 'Uqubah Al-Jild Fiqhan Wa Siyasiyatan*, AL ADL Journal 47. hlm 182-206. Terj. Nur Pratiwi Jurnal: Aladl Journal, A quarterly refereed journal concerned with juristic and legal issues published by the Ministry of Justice in the Kingdom of Saudi Arabia.
- Hassan Abbas. *The Islamization of Pakistan*. Washington, DC.: The Middle East Institute, A Special Edition of Viewpoints. 1979-2009.

- Ibnu Rusyd. 1995. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Hajar Al Asqalani. 2009. *Fathul Baari Penjelasan Kitab: Syarah Shahih Al Bukhari*, Jilid 33, No. 6778. Amir Hamzah Terj. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Bukhari. 1989. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar-Ashashah.
- Jasri Jamal et.al. 2011. *Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Penguam Syarie dalam Penyelesaian Pertikaian di Mahkamah Syariah di Malaysia : Satu Kajian Awal*, National Conference on Dispute Resolusion 2011 Proceedings : Tranformation of Mechanism and Law of Dispute Resolution. Fakulty of Law Universiti Kebangsaan Malaysia. 20 October 2011.
- K. Zweigert & H. Krozt. 1978. *An Introduction to Comparative Law*. Oxford Clarendon Press.
- Louèr, Laurence. 2008. *Transnational Shia politics: religious and political networks in the Gulf*. ISBN 978-0-231-70040-5. http://en.wikipedia.org/wiki/legal_system_of_Saudi_Arabia#cite_ref-Louèr_hlm_284-289.
- Mahmud Saedong Awang Otman. 2000. *Nizam Uqubah dalam Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia : Tinjauan Kepada Perundangan Islam*. Abdul Monir Yaacob et. al. (pnyt.). Kuala Lumpur: Institut Kafahaman Islam Malaysia (IKIM).
- Martin Lau. 2010. *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, O, Jan Michiel (pnyt.). Netherlands: Leiden University Press.
- Mat Saad Abdul Rahman. 2000. *Uqubah Menurut Undang-Undang Jenayah Islam : Tinjauan Kepada Perundangan Islam*. Abdul Monir Yaacob et. al. (pnyt.). Kuala Lumpur: Institut Kafahaman Islam Malaysia (IKIM).
- Mansoor Jassem Alshamsi. 2011. *Islam and Political Reform in Saudi Arabia: The Quest for Political Change and Reform*. New York and Landon: Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Grou.

- Mohd Al-Adib Samuri. 2012. *Teori Pencegahan Sebagai Justifikasi Hukuman: Analisis Perbandingan antara Perundangan Sivil dan Islam*. Jurnal Islamiyyat. Volume: 34. Bangi Malaysia: Fakulti Pengajian Islam UKM.
- Muhammad Azam Muhammad Adil. 1999. *Intitusi Qada' Dalam Sejarah Islam*, Jurnal Syariah. Jilid: 7. Bilangan: 2. Kuala Lumpur: Fakulti Syariah Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- Muhammad Firdaus. 2006. *Ensiklopedia Asas Fardhu Ain*. Batu Caves Selangor Malaysia: Crescent News Sdn. Bhd.
- Muhammad Mustafa Al-Zuhaily. 2012. *Al-Mu'tamad Dalam Fiqh Madhab Syafi'i Jilid 9 Jihad dan Undang-Undang Jenayah*. Terj. Azhar Bin Yahya et. al. Kuala Lumpur: Persekutuan Seruan Islam (Jam'iah).
- Muhammad Az-Zuhaili. 2009. *Al-Mu'tamad – Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 5. Terj. Yusuf Sinaga et. al. Puchong-Selangor Malaysia: Berlian Publication Sdn. Bhd.
- Mustafa Bugha. 2013. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Terj. Muhammad Amar Adly et. al. Johor Bahru Malaysia: Perniagaan Jahabersa.
- Mushtaqur Rahman et.al. 2007. *Geography of the Muslim world*. Chicago, Illinois, United of America: IQRA' International Education Foundation.
- Nasimah Hussin. 2004. *The Discretionary Power of The Jugle in The Determination of Ta'Zir Punishment*. Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat. Bangi: Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Nasimah Hussin, et al. 2007. *Undang-Undang Islam Jenayah, Keterangan dan Prosedur*. Selangor Darul Ehsan, Malaysia: Dawama Sdn. Bhd.
- Nasrullah. 2006. *Konsep Hukuman Ta'zir*. Tesis Program Pasca Sarjana. Darussalam Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry.
- As-Sayyid Sabiq. 2009. *Fiqh as-Sunnah*. Dar al-Fath al-I'lam al-'Arabi, Fiqh Sunnah Jilik V. Terj. Nor Hasanuddin et. al. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication.

- Nurrohman et.al. 2002. *Politik Formalisasi Syariat Islam dan Fundamentalisme: Kasus Nanggroe Aceh Darussalam*. Jurnal Istiqro. Volume: 01. Nomor: 01.
- Rusjdi Ali Muhammad. 2003. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Ciputat Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran.
- Sahetatapy JE. et.al. 2004. *Membangun Peradilan Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam*. Laporan Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Sayyid Sabiq. 2008. *Fiqihus Sunnah* (Fiqh Sunnah). Terj. M. Ali Nursyidi et. al. Jakarta: Darul Fath, Pena Pundi Aksara.
- Sheikh M. Abdul Athi Buhairi. 2008. *Tafsiran Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Laziina Aamanuu*, Jilid 1. Terj. Juhan Che Yaman. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publications.
- Zaini Nasohah. 2008. *Beberapa Aspek Mengenai Hukuman Jenayah*. Siti Zalikah Haji Md. Nor et al (pnyt.). Jurnal : Al-Syariah: Fiqh Jenayah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Syaikh Abdul Rahman Al-Jazairi. 2011. *Fiqh 4 Mazhab Juzuk 4 dan 5*. Terj. Yusuf Sinaga et. al. Johor Bahru Malaysia: Perniagaan Jahabersa.
- Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri. 2007. *Ensiklopedi Islam*. Achmad Munir Badjeber, et.al. Terj. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Siti Zalikah Haji Md. Nor et. al. 2008. *Beberapa Aspek Mengenai Hukuman Jenayah*. Zaini Nasohah (pnyt.). Jurnal: Al-Syariah: Fiqh Jenayah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Tahir Mahmood, et. al. 1996. *Criminal Law in Islam and the Muslim World A Comparative Perspective*. New Delhi: Institute of Objective Studies.
- Tahir Wasti. 2009. *The Application of Islamic Criminal Law in Pakistan: Sharia in Practice*. Leiden Netherlands: Koninklijke Brill NV.
- Tan Sri Syed Agil Barakbah. 2000. *Kedudukan dan Pelaksanaan Undang-Undang Jenayah di Pakistan*. Dlm. Abdul Munir

- Yaacob et.al. (pytg). *Tinjauan Kepada Perundangan Islam*. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).
- Taufik Adnan Amal et.al. 2004. *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- V, Frank E. 2000. *Islamic law and legal system: studies of Saudi Arabia*. Leiden Netherlands: Koninklyke Brill NV.
- Wahbah al-Zuhaili. 2011. *Figih Islam wa-Adillatuhu (Fiqh dan Perundangan Islam)*, Jilit VII . Damaskus Syria: Dar Fikr, Saadullah al-Jabiri Stret. Abdul Hayyie et. al. Terj. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir.
- Wahbah al-Zuhaili. 2005. *al-Figh al-Islami wa-Adillatuhu al-Juz' al-Sadis*. Damascus: Dar Fikr, Saadullah al-Jabiri Stret. (Figh dan Perundangan Islam Jilit VI/Wahbah Al Zuhaili, Ahmad Shahbari Salamon et. al. Terj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Wahbah Zuhaili. 2010. *Al-Fiqihu Asy-Syafi'I Al-Muyassar*. Darul Fikr. Beirut. 2008 H, Fiqih Imam Syafi'I. Edisi Indonesia. Jilit: 3. Terj. Muhammad Afifi et. al. Jakarta: Almahira.
- Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaki Al-Din 'Abd Al-Azim Al Mundziri. 2004. *Ringkasan Shahih Muslim*. Batu Caves - Selangor Malaysia: Crescent Nes KL Sdn. Bhd.
- Ziba Mir Hosseini et.al. 2006. *Islam and Democracy in Iran: Eshkevari and the Quest for Reform*. New York: Published I.B.Tauris & Co Ltd.
- Ziba Mir-Hosseini. 2010. *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. O, Jan Michiel (pnyt.). Netherlands: Leiden University Press.
- Zul Fadzli Mat Rawi. 2007. *Syariah Perundangan Islam (Siri Asas Islam dan Pengibadatan)*. Melaka Malaysia: Associated Educational Distributors.
- Zuly Qodir. 2004. *Syariah Demokratik : Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia*. Yokyakarta Indonesia: Pustaka Pelajar.

Zulkifli Muhammad al-Bakri. 2009. *Al-Fiqh Al-Manhaji Madhab Al-Syafie Jilid Enam*. Terj. Mustafa Al-Khin et. al. Bangi-Selangor Malaysia: Darul Syakir Enterprise.

PROFIL PENULIS

Hamdani, Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Malikussale Lhokseumawe. Lahir di Tongperia Pidie pada tahun 1970. Penulis S1 (**Sarjana Hukum**) di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh pada tahun 1996 dan menamatkan S2 (**LLM**) di Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, pada tahun 2004. Penulis memperoleh Gelar **Ph.D** dari Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, pada tahun 2016 dalam bidang Hukum Pidana Islam. Selain daripada itu penulis juga menulis buku dan jurnal yang pernah diterbitkan diantaranya, ***Prosedur Sebatan Syariah di Provinsi Aceh Indonesia dan Malaysia: Kajian Perbandingan*** (dalam Maslinda Yusuf et.al. (Penyunting), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi-Selangor, Malaysia, 2016. ***Hukum Pidana Islam***, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe, 2017.

PROFIL EDITOR

Muhammad Nasir, Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Malikussale Lhokseumawe. Lahir di Meunasah Blang, pada tanggal 01 Mei 1978. Menyelesaikan S1 (**Sarjana Hukum**) di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh pada tahun 2003 dan menamatkan S2 (**LLM**) di Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, pada tahun 2010. Memperoleh Gelar **Ph.D** dari Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, pada tahun 2018. Saat ini dipercayakan sebagai Koordinator Prodi Megister Hukum Fakultas Hukum Unimal.

Yusrizal, Lahir di Kampung Tempel, 13 April 1983. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2005. Lulus S2 di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2011. Lulus Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2024 bidang konsentrasi Hukum Pidana. Saat ini adalah Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh sejak tahun 2006 s/d sekarang. Saat ini juga dipercayakan sebagai Ketua DPW Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia (DIHPA) Provinsi Aceh.

Ferdy Saputra, Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Malikussale Lhokseumawe. Lahir di Banda Aceh, pada tanggal 12 April 1987. Menyelesaikan S1 (**Sarjana Hukum**) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan pada tahun 2010 dan menamatkan S2 (**M.H**) di Fakultas Hukum Sumatera Utara, pada tahun 2013. Saat ini juga dipercayakan sebagai Sekretaris DPW Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia (DIHPA) Provinsi Aceh.

Buku "**Hukum Cambuk Dalam Islam**" merupakan salah satu bentuk hukuman yang diterapkan kepada orang yang beragama Islam yang melakukan pelanggaran terhadap kejahatan syariah di Aceh, sementara di Malaysia, hukuman cambuk diterapkan dalam hukum pidana syariah dan pidana sivil (pidana umum) dan juga diterapkan di negara-negara Islam yang lain seperti Arab Saudi, Pakistan dan Iran. Fokus tulisan ini hanya pada kasus pidana syariah. Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman dalam hukuman pidana Islam.

Hukuman cambuk tidak dikenal dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Provinsi Aceh dalam menerapkan hukuman cambuk dan bentuk hukuman pidana Islam lainnya yaitu dalam bentuk kejahatan qisas dan pembayaran diyat yang belum diterapkan. Hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh menjadi salah satu Solusi dalam menjaga ketertiban dan kedamaian dalam suatu masyarakat. Hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh juga menjadi model dalam penerapan hukuman pidana Islam dalam Masyarakat Muslim di Asia Tenggara. Buku ini juga diharapkan menjadi dinamika dalam memperkaya Hukum Pidana Nasional Indonesia



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / (0353) 3234874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-146-3



9

786342

781463